

## Waspada Klaster Bukber, Warga Diimbau Tidak Abaikan Prokes

**BOGOR (IM)**- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mengimbau agar masyarakat Kota Bogor tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan buka bersama (bukber) agar tidak terjadi klaster bukber.

Sejauh ini, pada awal Ramadan sempat muncul klaster baru Covid-19 di Kota Bogor setelah ada kegiatan kumpul dan makan-makan bersama.

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan, kegiatan bukber ini menjadi risiko karena warga makan sambil ngobrol yang terpaksa membuka masker.

"Di situ rentannya, meski sampai hari ini belum ada klaster bukber. Akan tetapi sebaiknya

diterapkan Prokes saat bukber sebagai bentuk antisipasi atau saling menjaga satu sama lain," kata Retno, Minggu (2/5).

Terkait perkembangan terbaru, hingga Sabtu (1/5) angka Covid-19 Kota Bogor penambahan kasus baru masih di bawah 50 kasus. Tercatat, penambahan kasus hari ini 32 kasus. Untuk penambahan kasus selesai isolasi/sembuh 16 kasus. Masih dalam pemantauan bertambah 16 kasus.

"Untuk total jumlah kasus di Kota Bogor saat ini tercatat 15.310 kasus. Masih sakit sebanyak 588 kasus. Untuk angka sembuh sebanyak 14.475 kasus. Total jumlah meninggal adalah 247 kasus," bebernya. ● **gio**

## Wagub Jabar Ancam Cabut Izin Sekolah yang Tahan Ijazah

**BANDUNG (IM)**- Minggu (2/5), diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional yang merupakan sebuah momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan akan penting dan strategisnya pendidikan bagi peradaban dan daya saing bangsa.

Di tahun 2021 ini, semua masih berada di tengah krisis pandemi Covid-19 dan dampaknya kepada bidang pendidikan adalah tidak bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka, tetapi biaya pendidikan tetap harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat.

Namun, ternyata ada pengaduan dari orang tua terkait penahanan ijazah siswa oleh sekolah karena menunggak biaya pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Kuzhanul Ulum, sangat menyayangkan di masa pandemi ini masih banyak lembaga pendidikan yang tetap melakukan penahanan ijazah. Karena, akan menghambat pendidikan anak, ia meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk melakukan tindakan tegas kepada mereka.

"Ini harus menjadi evaluasi, kalau perlu dipanggil ketua yayasan atau kepala sekolahnya. Niat anda membuat lembaga pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau memang niatnya mencari keuntungan? Kalau memang mereka niatnya mencari keuntungan, kita evaluasi ijinnya kalau perlu ditutup karena sangat merugikan masyarakat, sehingga ada kecemburuan,"

ujar Uu pada saat acara Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat secara virtual, Minggu (2/5).

Selain penahanan ijazah, biaya pendaftaran siswa baru saat ini masih tergolong sangat mahal hingga mencapai Rp 10 juta hingga Rp 15 juta untuk bisa masuk ke sekolah. Sehingga diperlukannya evaluasi yang disesuaikan dengan fasilitas yang didapat ketika anak masuk sekolah.

"Saya berharap kepada Dinas Pendidikan, untuk mengevaluasi lembaga atau sekolah yang memberikan biaya pendaftaran yang sangat fantastis. Kami sering dikeluhkan oleh masyarakat, di satu sisi masyarakat ingin memiliki anak cerdas yang hebat, pendidikan yang normal, fasilitas yang bagus tapi di sisi lain terkendala oleh biaya yang mahal," papar Uu.

Untuk melancarkan proses evaluasi tersebut, Uu meminta bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat agar melapor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai biaya pendidikan yang masih mahal dan memberatkan karena pendidikan ini adalah hak seluruh masyarakat. Pemprov Jawa Barat, kata dia, akan mengevaluasi dan saya minta informasi kepada masyarakat yang merasa keberatan atau sekolahnya dekat tapi biayanya mahal harus lapor kepada kami. "Insya Allah kami akan panggil, akan kami undang sekolahnya dan langsung kami tanya maksudnya," kata Uu. ● **pur**

## Disparbud: Kapasitas Pengunjung Wisata di Jabar Maksimal 50 Persen

**BANDUNG (IM)**- Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat (Disparbud Jabar) menyatakan bahwa semua tempat wisata di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat maksimal 50 persen dari kapasitas total pengunjung.

Kadisparbud Jabar, Dedi Taufik mengatakan, keputusan itu telah disepakati bersama oleh semua dinas pariwisata di kabupaten dan kota di Jabar. Pasalnya, larangan mudik dikawatirkan membuat lonjakan pengunjung di 108 wisata unggulan di Jabar.

Seperti diketahui pada masa larangan mudik mendatang, masyarakat dibatasi secara aglomerasi wilayah. Di Jabar ada aglomerasi Bodebek dan Bandung Raya. "Kuncinya kapasitas harus terjaga.

Kita semua sepakat kapasitas wisata hanya 50 persen. Edukasi harus ditekankan dan diinformasikan. Kita juga lakukan sosialisasi ke tempat wisata untuk prokes, gugus tugas, dan kapasitas pengunjung," kata Dedi, Minggu (2/5).

Ia berharap semua pimpinan Dinas Pariwisata di seluruh kabupaten/kota di Jabar berkomitmen bersama untuk mengedepankan keselamatan masyarakat dari pandemi Covid-19, bentuk SDM dari Dinkes di kabupaten/kota.

"Kita harus mengedepankan keselamatan rakyat dan tidak ada klaster baru di libur panjang ini. Harus menjadi komitmen bersama, tidak hanya dari dinas kabupaten dan kota, tapi juga dengan para pelaku wisata," ucapnya. ● **pur**

## Pemkab Bogor Dapat Bantuan dari IOM dan ECHO



**BOGOR (IM)**- Bupati Bogor, Ade Yasin menerima bantuan dari International Organization for Migration (IOM) dan European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation (ECHO).

Bantuan itu berupa tom air, paket hygiene, papan informasi, paket isolasi mandiri, lampu tenaga surya, dan baju hazmat yang diserahkan di Kantor Bupati Bogor Cibinong, baru-baru ini.

"Alhamdulillah selama masa pandemi ini kita berada di zona merah hanya satu kali, selebihnya berada zona orange. Saat ini kondisinya terkendali walaupun satu harinya hampir 100 kasus, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk itu memang lebih sedikit dibanding kota-kota lain," kata Ade Yasin, saat menerima bantuan IOM ECHO itu.

Kabupaten Bogor pernah mengajukan PSBB yang pertama di Jabodetabek dengan catatan-catatan. Ini sebagai upaya agar angka tertularnya menurun, dan sampai saat ini masih diberlakukan PPKM.

Selain itu, juga melakukan

penanganan maksimal melalui 4 RSUD dan 2 pusat isolasi, tapi kalau yang menangani Covid itu di Bogor ada 29 rumah sakit. "Meskipun sekarang sudah turun, kita harus tetap waspada, katanya.

Ia menyadari, penanganan bencana, memang beban yang dirasakan berat, misalnya, bencana banjir besar dan longsor di wilayah Kecamatan Jasinga. Jumlah korbannya banyak, belum selesai penanganan itu datanglah bencana non alam Covid-19. "Jadi saat itu kita harus betul-betul menjaga, jangan sampai saat terkena musibah, ditambah terpapar Covid-19," ucapnya.

Soal bantuan, Ade Yasin menyatakan, pihaknya bersyukur sekali atas bantuan dan dukungan yang diberikan IOM dan ECHO. "Kami tidak melihat besar kecilnya, tapi lebih melihat kepeduliannya, kami mencoba dengan senang hati. Bantuan dan dukungan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor," cetus Ade Yasin. ● **pur**

# 8 | Nusantara



## BERBURU BAJU LEBARAN DI PASAR

Sejumlah warga membeli baju untuk kebutuhan Lebaran di Pasar Manis Ciamis, Jawa Barat, Minggu (2/5). Sebagian warga memilih berburu kebutuhan makanan dan baju Lebaran lebih awal lantaran mereka khawatir terjadi penyekatan di masa larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021 mendatang.

## RIBUAN KENDARAAN TERJARING GANJIL GENAP

# Bima Arya: Mobilitas Warga Bogor Masih Tinggi

Ke depan selain ganjil genap, petugas gabungan dari TNI/Polri, Dishub, Satpol PP juga akan melakukan penyekatan pemudik atau pendatang mulai 6-17 Mei 2021. Tanggal 6 Mei akan dimulai sekat untuk batas kota selama 24 jam pengetatan terkait larangan mudik hingga 17 Mei 2021.

**BOGOR (IM)**- Sebanyak 2.361 kendaraan terjaring ganjil genap Kota Bogor. Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebut ribuan kendaraan terjaring lantaran mobilitas warga masih banyak menjelang berbuka puasa.

"Ganjil genap Sabtu Minggu selama 2 jam ini target utamanya adalah menyampaikan pesan kepada warga Bogor untuk mengurangi mobilitas. Karena mobilitas tinggi yang menyebabkan kenaikan kasus

Covid-19. Terjadi kerumunan di mall, dan di tempat-tempat lain yang tidak menerapkan protokol kesehatan," ungkap Bima Arya, Minggu (2/5).

Menurut Bima, macet yang terjadi di beberapa titik merupakan hal wajar. Artinya masih banyak warga yang tetap melakukan mobilitas. Jadi pesan pemkot kepada seluruh warga kalau tidak mau terjebak macet, kurangi mobilitas. "Ini adalah kondisi, menyampaikan peringatan kepada warga agar ke depan tetap dikurangi mobilitas. Terutama nanti libur hari raya. Weekend minggu depan dan minggu depannya lagi tetap kita akan perketat," jelas Bima.

Ke depan, kata Bima, pemkot akan melakukan pengetatan terkait larangan mudik 6-17 Mei 2021. "Jadi ada penyekatan-penyekatan di titik-titik batas kota. Sekarang prakondisi menuju ke sana, hanya di pusat kota (ganjil genap). Tapi ini prakondisi menyampaikan pesan peringatan awal kepada semuanya," terang Bima.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Susatyo Purnomo Condoro menjelaskan, aktivitas masyarakat menjelang waktu berbuka puasa masih tinggi sehingga menimbulkan kerumunan di kawasan perbelanjaan dan kuliner yang terhubung melalui sistem satu arah (SSA).

"Jadi sebenarnya kalau warga Kota Bogor memilih mobilitas di wilayah masing-masing, di kecamatan masing-masing, tidak akan sepadat ini. Nikmati yang ada di wilayahnya masing-masing, baik itu perbelanjaan maupun kuliner," kata Susatyo.

Ke depan selain ganjil genap, petugas gabungan dari TNI/Polri, Dishub, Satpol PP juga akan melakukan penyekatan pemudik atau pendatang mulai 6-17 Mei 2021. "Tanggal 6 Mei akan kita mulai sekat untuk batas kota selama 24 jam. Tapi untuk Sabtu Minggu pekan ini hanya 2 jam terkait dengan tingginya mobilitas menjelang buka puasa," pungkasnya. ● **gio**

## Wabub Bogor Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Mudik

**BOGOR (IM)**- Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Transportasi pada Masa Idul Fitri 1442 Hijriyah di Provinsi Jawa Barat. Dia didampingi perangkat daerah untuk mencanai arahan dari Ketua Satgas Covid-19 Republik Indonesia, Menteri Perhubungan, dan Gubernur Jawa Barat. Rakor dilaksanakan secara virtual di Ruang Rapat I Sekretariat Daerah, Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin.

Ketua Satgas Covid-19 RI, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menjelaskan, aktivitas dalam sosial ekonomi harus tetap berjalan, mereka yang berpergian dengan dokumen resmi baik yang ASN, TNI, Polri, dan juga pegawai BUMN serta swasta, dipersilakan. Masyarakat juga bisa melengkapi dokumen untuk berpergian dan Kepala Desa atau Lurah. Semua tetap berjalan, yang dilarang adalah mudik.

"Aktivitas selain mudik, masih diberikan kesempatan. Oleh karena itu, seluruh petugas di lapangan diminta untuk mempelajari aturan ini supaya tidak terjadi gesekan dengan masyarakat. Masyarakat juga diharapkan bisa mengetahui ketentuan yang ada," jelas Doni yang juga Kepala BNPB RI.

Doni menambahkan, mari kita songsong perayaan Idul Fitri

dengan meningkatkan silaturahmi melalui virtual. Seluruh pimpinan di daerah harus bekerja keras untuk bisa memberikan fasilitas komunikasi virtual bagi warga masyarakatnya yang secara ekonomi mungkin punya keterbatasan. Kami juga mengimbau kepada jangnan provider di daerah untuk meningkatkan kapasitasnya.

"Alhamdulillah tiga kali terjadi libur panjang tahun ini, namun tidak terjadi kenaikan kasus seperti tahun lalu. Mari sekali lagi kita belajar, setiap hari kita belajar dari apa yang terjadi pada kita semua. Kalau literasi tentang Covid-19 semakin baik, maka bangsa kita akan bisa lebih baik lagi," ungkap Doni.

Doni meyakini, dengan kerja sama dan kerja keras kita semua, pengendalian akan jadi lebih baik. Pengalaman tahun lalu, kita harapkan tidak terulang pada tahun ini. Insya Allah bangsa kita akan dapat mengendalikan Covid, masyarakat tidak terpapar Covid dan juga tidak terpapar ekonomi yang sulit.

Selanjutnya Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menuturkan, dirinya mengapresiasi seluruh peserta rapat koordinasi. Ini satu bukti bahwa koordinasi yang kita lakukan pada hari ini sangat efektif. Apa yang disampaikan hari ini tolong dipelajari lebih baik dan dijalankan.

Kita tetap tegas, tetapi kita juga tidak kaku. Jangan seperti penguasa yang menakuti rakyatnya.

"Semoga apa yang menjadi harapan kita semua dalam menanggulangi Covid-19 ini dapat lebih baik," tutur Budi Karya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengingatkan yang paling rawan dalam aktivitas mudik ini adalah para lansia. Para ulama bersepakat ada syariatnya, bersilaturahmi itu kan mencari kebaikan, mencari kemuliaan.

"Orang tua itu mulia tapi kalau mencari kebaikan dan kemuliaan, orang tua itu kan rentan dengan potensi penularan, maka secara syariat yang benar saat ini adalah mencegah kemudahan dengan menajui potensi penularan. Mencari kemuliaannya bisa lewat virtual," kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil juga menitikpkan kepada Camat yang hadir, di mana desa ada 2.300-an, pastikan kalau pun ada bocor, pemudik tiba-tiba sampai di kampung halaman, harus karantina 5 hari. Tolong dipersiapkan. Apakah di SD yang tidak dipakai, atau di manapun, atau dengan inovasi lainnya juga boleh, yang penting amati jangan sampai lengah terhadap potensi kebocoran pemudik yang datang tiba-tiba, katanya. ● **gio**

## Warga Padati Pasar Baru Bandung

**BANDUNG (IM)**- Ribuan warga menjajal Pasar Baru Trade Center Kota Bandung, Minggu (2/5). Para pembeli berdesak-desakan berburu aneka komoditas untuk memperingati Lebaran 1442 H.

Pantauan di lokasi, kerumunan terlihat sejak memasuki Jalan Otto Iskandar Dinata. Warga berlalu lalang di antara antrian kendaraan yang hendak mencari tempat menepi untuk masuk ke Pasar Baru.

Kepadatan warga juga terlihat di lantai satu Pasar Baru. Sejumlah warga yang tak mengenakan masker dengan benar, terus diimbau oleh petugas keamanan yang mengingatkan protokol kesehatan melalui pengeras suara.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Baru, Iwan Suhermawan mengatakan, kerumunan warga tak bisa dihindari. Kendati begitu, ia menekankan kepada setiap pedagang yang tergabung dalam asosiasi untuk setidaknya menyediakan hand sanitizer dan patuh memakai masker.

"Kami dari himpunan pedagang juga mendapatkan imbauan dari pengelola untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan tetap harus

memakai masker dan menyediakan tempat cuci tangan. Kita menyadari memang sangat sulit untuk menghindari kerumunan, tetapi pengunjung juga selalu diingatkan petugas," kata Iwan saat dihubungi, Minggu (2/5).

Kendati demikian, Iwan menuturkan relaksasi yang diberikan Pemkot Bandung tahun ini memberikan peluang lebih luas bagi pedagang untuk menggerakkan sendi-sendi perekonomian. Pasalnya, tahun lalu kegiatan perdagangan di Pasar Baru mati suri mengingat ditutupnya Jalan Otista agar warga tak berkerumun.

"Tahun kemarin ada 60 persen pedagang yang tutup. Sekarang yang tutup 50 persen. Berarti ada penambahan yang mulai usaha kembali," katanya. Meski warga berjubel, dikatakan Iwan hanya barang-barang tertentu seperti baju koko, dan fesyen trendi seperti jeans dan kaos yang ramai diburu pembeli. "Pedagang tas dan sepatu juga belum, baju seragam dan oleh-oleh haji juga belum banyak yang buka.

Ya karena sekolah belum bisa tatap muka dan berangkat ke Mekkah untuk haji juga belum bisa," ujarnya. ● **pur**

## Dinilai Cukup Memuaskan, DPRD Jawa Barat Menerima LKPJ Gubernur Jabar 2020

**BANDUNG (IM)**- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Akhir Tahun Anggaran 2020.

Berkas laporan LKPJ diserahkan Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil kepada Ketua DPRD Jabar, Taufik dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (30/4).

Penilaian DPRD Jabar cukup memuaskan walau dengan beberapa catatan yang harus diperbaiki.

Sebelum mendapat rekomendasi, LKPJ Gubernur terlebih dulu dibahas oleh Pansus I. Berdasarkan hasil pencermatan dan minim-bang seluruh catatan strategis di tiap bidang, Pansus I DPRD Jabar menghasilkan 66 poin rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2020.

Wakil Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat,



Yod Miantaraga dalam laporannya mengatakan, semua rekomendasi tersebut dikaji berdasarkan data dan fakta berupa indikasi menurunnya capaian kinerja yang dialami oleh cukup banyak perangkat daerah, baik dibandingkan dengan target semula maupun dibandingkan dengan capaian tahun-tahun lalu.

"Maka Pansus I memberikan penilaian kinerja Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tingkat cukup memuaskan," ucap Yod.

"Kami meminta saudara gubernur agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD, untuk perbaikan di tahun berikutnya," tambah Yod.

Selain itu Yod menyampaikan, bahwa seluruh capaian



indikator yang selanjutnya dirangkum dalam sejumlah catatan strategis menunjukkan kesenjangan antara harapan dan capaian.

Yod menambahkan, adapun sejumlah klasifikasi permasalahan pembangunan di Jawa Barat pada tahun 2020 di antaranya masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial.

Selanjutnya masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya kemandirian pertumbuhan ekonomi, pemencaran lingkungan, dan terakhir masih belum optimalnya kinerja pemerintahan daerah. ● **lys**